



RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK TAHUN 2025



RENCANA KERJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PONTIANAK TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak 2024-2026 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak 2024-2026. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Renja Tahun 2025 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang.



Pontianak, Agustus 2024

AHMAD HASYIM, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 196806151998031009

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2025 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka pemerintah daerah wajib melakukan evaluasi tentang pelaksanaan RKPD setiap tahunnya. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Pontianak. Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pontianak memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok saran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa Persiapan penyusunan Renja.

Selanjutnya persiapan Rancangan Awal Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pontianak yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pontianak tahun lalu dan evaluasi hasil Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pontianak tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pontianak; pembahasan Rancangan Awal Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pontianak; perumusan Rancangan Akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pontianak; Verifikasi Rancangan Akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pontianak.

Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pontianak Tahun 2025 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pontianak untuk tahun kedua. Renja 2025 dasarnya adalah Renstra 2024-2026 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pontianak, periode renstra sama dengan periode RPD yaitu 2024-2026 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pontianak Tahun 2025 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pontianak mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak tahun 2025, Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pontianak. Renja harus selaras dengan dokumen- dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pontianak.

Dalam Pelaksanaannya pada tahun kedua. Periode Renstra sama dengan periode RPD yaitu 2024-2026 pada sasaran, indikator sasaran, target sasaran, program, lokasi, indikator dan/atau target pembangunan jangka menengah menyesuaikan nomenklatur program dan kegiatan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Selanjutnya, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2025 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Kota Pontianak Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2025 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi

Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
- 16) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
- 17) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
- 18) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
- 19) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 117). (contoh perwa tentang tupoksi)
- 20) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
- 21) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Strategis ... (nama perangkat daerah) Kota Pontianak Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor ...).
- 22) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 10).

- 23) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Strategis ... (perangkat daerah) Kota Pontianak Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor ...).
- 24) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor ...).
- 25) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 218);
- 26) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
- 27) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5);

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pontianak adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pontianak dengan periode 5 (lima) tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum dilingkup Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pontianak dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Maksud disusunnya Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pontianak 2025 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024- 2026.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renja PD dengan renstra PD serta dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dana/atau masukan dari pemangku kepentingan meliputi:

1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Menetapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pembinaan Kerukunan Antarsuku Dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Dan Nasional.
4. Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Koordinasi Pelaksanaan Tugas Antarinstansi Pemerintahan Yang Ada Di Wilayah Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Untuk Menyelesaikan Permasalahan Yang Timbul Dengan Memperhatikan Prinsip Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pemerataan, Keadilan, Keistimewaan Dan Kekhususan, Potensi Serta Keanekaragaman Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila.
7. Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal.

Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana yaitu:

- a. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pontianak.
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- c. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
- d. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, makasistematika dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pontianak tahun 2025 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Penyusunan Renja Tahun 2025 merupakan tahun kedua dari renstra perangkat daerah periode 2024-2026. Tahun 2024 yang merupakan tahun pertama baru berjalan beberapa bulan sehingga tidak bisa dilakukan evaluasi tahunan. Untuk itu, pengisian Tabel TC. 29 lebih diarahkan pada pengisian Urusan, Bidang Urusan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta indikator dan targetnya di akhir tahun renstra (2026) dan target pada tahun berjalan (2024)

Beberapa kali perubahan regulasi tentang nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, dan satuannya menjadi salah satu kendala dalam penghitungan realisasi dan capaian. Misalnya setelah menetapkan indikator dan satuan pada saat penyusunan dokumen renstra, ternyata tahun berikutnya keluar aturan baru yang mewajibkan perubahan pada indikator dan satuan. Akibatnya terjadi ketidaksinkronan antara perencanaan dan evaluasi. Adapun indikator-indikator sebagai berikut :

1. Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan satu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya dapat dianalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
2. Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
3. Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang pencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sudah mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

Tabel II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Bakesbangpol s/d Tahun 2024 Kota Pontianak

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2		3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Urusan Pemerintahan Umum											
01				Bidang Urusan Pemerintahan Umum											
01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepuasan Bidang terhadap pelayanan Kesekretariatan	%	100%	0	0	0	0	#DIV/0!	90%	0,9	90,00
01	01	2.01			Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	%	100%	0	0	0	0	#DIV/0!	100%	100%	100,00
	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24	0	0	0	0	#DIV/0!	8	8	33,33
	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	21	0	0	0	0	#DIV/0!	7	7	33,33
01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100%	0	0	0	0	#DIV/0!	100%	100%	100,00
	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	66	0	0	0	0	#DIV/0!	22	22	33,33
	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	18	0	0	0	0	#DIV/0!	6	6	33,33
	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100%	0	0	0	0	#DIV/0!	100%	100%	100,00
	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	96	0	0	0	0	#DIV/0!	32	32	33,33
	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	%	100%	0	0	0	0	#DIV/0!	100%	100%	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintarn Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Oaerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (n-1) tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target program dan kegiatan Perangkat Daerah (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Oaerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perang t Oaerah tahun(n-2) 2023	Realisasi Renja Petongk..tt Oaerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024	tingkal Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			0003		NA				8=(7/8)		10=(5+7+9)	11=(10/4)
			0004		1066 orang				#DIV/0!	1066 orang	#VALUE!	#VALUE!
				Jumlah Fasilitas Desak perahu					#DIV/0!	100 orang		#VALUE!
			0005						#DIV/0!			10(>.00
04				PENQAW:::SAW:::ort. IW1 KEMASYAANJJ..TAH	255%				#DIV/0!	BS%	85%	33.33
04	2.01								#DIV/0!			33.33
04	2.01	0003		Praktikum Kebijakan di Bidang Pelayanan Omas, Pemantauan Omas, Evaluasi dan Mediasi Pengelola Omas, Pengawasan Omas dan Omas Ading di Daerah					#DIV/0!			33.33
04	2.01	0005							#DIV/0!			33.33

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hal Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Gapaian Target Rensira Perangkat Daerah s/d tahun be alan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun be alan (tahun o-1) W24	Tingkat Capaian Realisasi Target Rensira (%)
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02			PADJARAN PENGUATAN IDEOLOGI DAN KAWITER KIBANGSAAN	001 p...11 gut...11... sino lo dirio W111,10f uoeng		270%	0	0	#DIV/0!	90%	90%	33,33
02.2.01			Perfektifikasi Kaitan Intelektual Pemanfaatan PPL-On	001 p...11 gut...11... sino lo dirio W111,10f uoeng		3	0	0	#DIV/0!			33,33
02.2.01.0004			Perfektifikasi Kaitan Intelektual Pemanfaatan PPL-On	001 p...11 gut...11... sino lo dirio W111,10f uoeng		2100	0	0	#DIV/0!	700	700	33,33
02.2.01.0008			Perfektifikasi Kaitan Intelektual Pemanfaatan PPL-On	001 p...11 gut...11... sino lo dirio W111,10f uoeng		96	0	0	#DIV/0!	32	32	33,33
02.2.01.0009			Perfektifikasi Kaitan Intelektual Pemanfaatan PPL-On	001 p...11 gut...11... sino lo dirio W111,10f uoeng		0	0	0	#DIV/0!	32	32	#DIV/0!
05			KELOMPOK MENDUKA KELOMPOK MENDUKA KELOMPOK MENDUKA	001 p...11 gut...11... sino lo dirio W111,10f uoeng		270	0	0	#DIV/0!	90%	90%	0,33
05.2.01			KELOMPOK MENDUKA KELOMPOK MENDUKA KELOMPOK MENDUKA	001 p...11 gut...11... sino lo dirio W111,10f uoeng		3	0	0	#DIV/0!			33,33
05.2.01.0004			KELOMPOK MENDUKA KELOMPOK MENDUKA KELOMPOK MENDUKA	001 p...11 gut...11... sino lo dirio W111,10f uoeng		300	0	0	#DIV/0!	100	100	33,33
06			KELOMPOK MENDUKA KELOMPOK MENDUKA KELOMPOK MENDUKA	001 p...11 gut...11... sino lo dirio W111,10f uoeng		100%	0	0	#DIV/0!	100%	100%	100,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023	Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Sid tahun berjalan		
						Keg1:::id an tahun (n-3) 2022	Pe:an :1Ri arah lahun(n-2) 2023	P:::i = =h lahun(n-2) 2023	TingkatRealisasi(%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sid tahun berjalan (lahun n-1) 2024	Tingkat Gapai1n Realisasi Target Renstra (%)
									8=(716)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06	2.01			Penyusunan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Pemangangan Konflik Sosial	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Pemangangan Konflik Sosial				110M/01		
06	2.01	0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kebangkitan Bilang Kewaspadaan, serta Pemangangan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kebangkitan Bilang Kewaspadaan, serta Pemangangan Konflik di Daerah				#01V/01	'50	33,33
06	2.01	0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kebangkitan Bilang Kewaspadaan, serta Pemangangan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kebangkitan Bilang Kewaspadaan, serta Pemangangan Konflik di Daerah						3-3,33

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Bakesbangpol Kota Pontianak Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Bakesbangpol Kota Pontianak Tahun 2025 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- a. Tujuan yang dikehendaki;
- b. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- c. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Bakesbangpol Kota Pontianak tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bakesbangpol Kota Pontianak disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2025. adalah ;

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.

No.	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja (%)
1.	Orang	500	400	80

Dari 6 Program/Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pontianak semuanya rata-rata **telah** mencapai target.

Renja Bakesbangpol Kota Pontianak menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023. Bakesbangpol Kota Pontianak pada Tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.931.937.529,- dengan rincian:

I. BELANJA OPERASI	
a. Belanja Pegawai	: Rp. 2.013.884.879,-
b. Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 2.283.316.250,-
c. Belanja Hibah	: Rp 18.614.590.000,-
d. Belanja Bantuan Sosial	: Rp. 0,-
II. BELANJA MODAL	: Rp. 20.146.400,-

Yang dialokasikan untuk pelaksanaan 6 program dan 11 kegiatan yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 22.534.824.295,00,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,27%.

Realisasi dari anggaran tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan program-program :

- 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Jumlah anggaran Rp. 748.620.600,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 742.652.200,00,- atau terealisasi sebesar 99,20 % terdiri dari Sub. Kegiatan:
- A. 1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Jumlah anggaran Rp. 748.620.600,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 742.652.200,00,- atau terealisasi sebesar 99,20 %
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
- A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. Jumlah anggaran Rp. 18.330.855.000,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 18.222.564.000,00,- atau terealisasi sebesar 99,41 % terdiri dari Sub. Kegiatan:
- A.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. Jumlah anggaran Rp. 3.314.590,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 3.314.590,00,- atau terealisasi sebesar 100,00%
- A. 2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. Jumlah anggaran Rp. 14.900.000.000,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 14.799.009.000,00,- atau terealisasi sebesar 99,32%
- A. 3 Pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Jumlah anggaran Rp. 116.265.000,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 108.965.000,00,- atau terealisasi sebesar 93,72 %

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Jumlah anggaran Rp. 481.250.000,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 456.750.000,00,- atau terealisasi sebesar 94,91 % terdiri dari Sub. Kegiatan :

A. 1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Jumlah anggaran Rp. 429.650.000,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 405.750.000,00,- atau terealisasi sebesar 94,44 %

A. 2 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Jumlah anggaran Rp. 51.600.000,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 51.000.000,00,- atau terealisasi sebesar 98,84%

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Jumlah anggaran Rp. 53.500.000,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 53.355.000,00,- atau terealisasi sebesar 99,73 % terdiri dari Sub. Kegiatan :

A.1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Jumlah anggaran Rp. 53.500.000,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 53.355.000,00,- atau terealisasi sebesar 99,73 %

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Jumlah anggaran Rp. 567.538.650,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 499.185.000,00,- atau terealisasi sebesar 87,96 % terdiri dari Sub. Kegiatan :

- A.1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah anggaran Rp. 409.538.650,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 376.030.000,00,- atau terealisasi sebesar 91,82 %
- A. 2 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah. Jumlah anggaran Rp. 158.000.000,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 123.155.000,00,- atau terealisasi sebesar 77,95 %
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Jumlah anggaran Rp. 24.178.500,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 24.178.500,00,- atau terealisasi sebesar 100 % terdiri dari Sub. Kegiatan :
- A.1 Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Jumlah anggaran Rp. 12.378.500,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 12.378.500,00,- atau terealisasi sebesar 100,00%
- A. 2 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Jumlah anggaran Rp. 11.800.000,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 11.800.000,00,- atau terealisasi sebesar 100,00%
- B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Jumlah anggaran Rp. 2.039.084.879,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 1.907.061.529,00,- atau terealisasi sebesar 93,53 % terdiri dari Sub. Kegiatan:
- B.1 Pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Jumlah anggaran Rp. 1.812.764.879,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 1.680.741.529,00,- atau terealisasi sebesar 92,72%
- B. 2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Jumlah anggaran Rp. 226.320.000,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 226.320.000,00,- atau terealisasi sebesar 100%
- C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Jumlah anggaran Rp. 36.850.000,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 30.300.000,00,- atau terealisasi sebesar 82,23% terdiri dari Sub. Kegiatan :

- C. 1 Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai. Jumlah anggaran Rp. 36.850.000,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp, 30.300.000,00,- atau terealisasi sebesar 82,23%
- D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Jumlah anggaran Rp. 263.358.238,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 256.126.367,00,- atau terealisasi sebesar 97,25 % terdiri dari Sub. Kegiatan :
- D.1 Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Jumlah anggaran Rp. 983.200,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp, 947.000,00,- atau terealisasi sebesar 96,32%
- D.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Jumlah anggaran Rp. 33.418.700,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp, 33.331.100,00,- atau terealisasi sebesar 99,74%
- D.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Jumlah anggaran Rp. 46.720.000,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp, 46.680.000,00,- atau terealisasi sebesar 99,91%
- D.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Jumlah anggaran Rp. 60.318.688,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp, 60.314.800,00,- atau terealisasi sebesar 99,99%
- D. 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan. Jumlah anggaran Rp. 3.000.000,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp, 3.000.000,00,- atau terealisasi sebesar 100%
- D. 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Jumlah anggaran Rp. 118,917,650,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp, 111.853.467,00,- atau terealisasi sebesar 94,06%
- E. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Jumlah anggaran Rp. 20.146.400,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 20.146.400,00,- atau terealisasi sebesar 100% terdiri dari Sub. Kegiatan :
- E. 1 Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Jumlah anggaran Rp. 20.146.400,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 20.146.400,00,- atau terealisasi sebesar 100,00 %

F. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah anggaran Rp. 345.955.262,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 302.028.799,00,- atau terealisasi sebesar 87,30% terdiri dari Sub. Kegiatan :

F. 1 Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Jumlah anggaran Rp. 60.878.262,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp, 57.554.399,00,- atau terealisasi sebesar 94,54%

F. 2 Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Jumlah anggaran Rp. 285.077.000,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp, 244.474.400,00,- atau terealisasi sebesar 85,76%

G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah anggaran Rp. 20.600.000,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 20.476.500,00,- atau terealisasi sebesar 99,40% terdiri dari Sub. Kegiatan :

G. 1 Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oerasional atau Lapangan. Jumlah anggaran Rp. 3.760.000,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp, 3.691.500,00,- atau terealisasi sebesar 98,18%

G. 2 Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 16.840.000,00,- dengan anggaran yang terserap sebesar Rp, 16.785.000,00,- atau terealisasi sebesar 99,67%

Dari hasil evaluasi Program/Kegiatan Pada Tahun 2023, didapat Pagu Tentative Anggaran dan realisasi dari APBD perubahan yaitu :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Belum Terserap
1.	BELANJA OPERASI				
	Belanja Hibah	18.330.855.000	18.222.564.000	99,41 %	108.291.000
	Belanja Barang dan Jasa	2.541.851.250	2.385.052.366		156.798.884
	Belanja Pegawai	2.039.084.879	1.907.061.529	93,53 %	132.023.350
	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00 %	0
2.	BELANJA MODAL				
	Belanja Moda Peralatan dan Mesin	20.146.400	20.146.400	100,00%	0

Adapun program dan kegiatan Bakesbangpol Kota Pontianak dari hasil evaluasi yang telah mencapai target kinerja yang telah direncanakan tahun 2023 adalah Program:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sebesar 99,20 %
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik sebesar 99,41 %
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebesar 94,91%
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebesar 99,73%
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional, dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial sebesar 87,96%
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 93,10%

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan

NOA5 :M15 A5:M A5:L1 2	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra 2024-2026				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	(Indikator Tujuan Renstra 2024-2026)											
	Meningkatnya Toleransi Di kalangan Masyarakat Indikator: Indeks Kota Toleran			0	4,85	4,95	5	0	0	4,95	5	
	(Indikator Sasaran Renstra 2024-2026)											
	Terwujudnya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak Indikator: Persentase penyelesaian konflik			0	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	

NOA5 :M15 A5:M A5:L1 2	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra 2024-2026				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	(Indikator ProQram)											
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIKDAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIKDAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Indikator: Persentase peningkatan pemahaman politik				90%	90%	90%			90%	90%	

NOAS :M15 A5:M A5:L1 2	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra 2024-2026				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Indikator: Persentase pemberdayaan ormas			0	85%	85%	85%	0	0	85%	85%	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Indikator: Persentase tingkat pemahaman nilai pancasila dan karakter kebangsaan			0	90%	90%	90%	0	0	90%	90%	

NOA5 :M15 A5:M A5:L1 2	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra 2024-2026				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI , SOSIAL DAN BUDAYA Indikator: Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya				90%	90%	90%	0	0	90%	90%	

NOA5 :M15 A5:M A5:L1 2	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra 2024-2026				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Indikator: Persentase fasilitasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial			0	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	

NOA5 :M15 A5:M A5:L1 2	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra 2024-2026				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator: Hasil Penilaian AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat			0	72	72,5	73	0	0	72,5	73	
	Indikator: Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah oleh Inspektorat			0	94,5	95	95,5	0	0	95	95,5	
	Indikator SPM (Tidak ada)											
	Indikator IKK (LPPD) Tidak ada											

Dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pontianak dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 dapat disimpulkan untuk target Renstra 2024 – 2026 sama dengan Proyeksi Tahun 2025 - 2026, adalah sebagai berikut:

1. Dari 6 (enam) program yang dilaksanakan Indikator Tujuan, Sasaran dan Program Renstra 2024-2026, seluruhnya tercapai dari target yang ditetapkan dan meningkat;
2. Begitu juga dengan Indikator Sasaran Renstra 2024-2026 yaitu : Terwujudnya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak dari Target Renstra dan Proyeksi tercapai 100%
3. Tidak terdapatnya Indikator SPM dan Indikator IKK (LPPD) sehingga capaiannya tidak dapat dimunculkan pada Target Renstra 2024-2026 dan tidak terdapat pencermatan pada Proyeksi Tahun 2025 dan 2026 pada tabel pencapaian kinerja pelayanan.

Bakesbangpol Kota Pontianak sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan kota yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga (*welfare state*).

Untuk mencapai visi dan misi Bakesbangpol Kota Pontianak melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam *core strategy* dan *core policy* dan diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Bakesbangpol Kota Pontianak adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban.

Sehingga adanya keterkaitan antara program Bakesbangpol dengan program tingkat Kota Pontianak menjadi mutlak. Bakesbangpol sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan Pemerintahan Umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2022, Bakesbangpol Kota Pontianak didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, Pemerintahan Umum dalam Bidang Keamanan Dan ketertiban serta Wawasan Kebangsaan .

Selama pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kota Pontianak mengalami peningkatan dalam menciptakan rasa aman . Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan tersebut meliputi:

1. Peningkatan Pencegahan, Penanganan serta Meningkatnya Toleransi di Kalangan Masyarakat.
2. Meningkatkan Pemahaman Politik Terhadap Elemen Masyarakat
3. Meningkatnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. ASN Dan SDM yang ada masih belum memenuhi kebutuhan secara ideal Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pontianak;
2. Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja masih perlu penambahan cukup signifikan ;
3. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait yaitu TNI / POLRI, Organisasi Masyarakat, LSM dan Elemen Masyarakat lainnya;
4. Belum Terbentuknya Forum di Tingkat Kelurahan (Kakel, Babinkantibmas, Babinsa) 3 Pilar yang terdiri dari Pemerintah, Polri dan TNI ;
5. Belum terbentuknya Forum kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Se Kota Pontianak;
6. Belum maksimalnya dalam mendeteksi dini terhadap permasalahan permasalahan yang timbul tentang IPOLEKSOSBUDHANKAM karena kurangnya koordinasi 3 Pilar yang ada di wilayah Kota Pontianak di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;

Dalam perkembangan kedepan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pontianak, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan terobosan kebijakan yang dimiliki, Bakesbangpol diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan.

Tabel II.3

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun Periode RPJMD
		2023	2023	2024	2025	2026		
I.	Indeks Kota Toleran Persentase penyelesaian konflik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel II.4

Kesesuaian Sasaran RKPD 2025 dan Rancangan Akhir RENJA 2025

RKPD	RENJA
Kota Pontianak Tahun 2025	Bakesbangpol Kota Pontianak 2025
Sasaran X : Meningkatnya Toleransi di kalangan masyarakat.	Tujuan : Meningkatnya Toleransi di kalangan masyarakat.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Faktor internal pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pontianak, yang merupakan kekuatan organisasi adalah adanya perundang- undangan di bidang Keamanan Dan ketertiban, Keormasan / Organisasi yang merupakan sumber pelaksanaan kegiatan, adanya hubungan/koordinasi antara satuan kerja yang cukup baik dan telah berkembangnya budaya kerja (motivasi kerja yang tinggi).

Disisi lain kelemahan yang ada adalah adanya keterbatasan jumlah pegawai, terbatasnya sarana pendukung kerja yang memadai serta terbatasnya keterampilan, pengetahuan dan kemampuan personil.

Kondisi Eksternal yang cukup berpengaruh terhadap pencapaian Sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pontianak yang merupakan peluang adalah adanya tuntutan organisasi yang selalu harus berkembang, adanya potensi daerah serta adanya dukungan satuan kerja lain dalam mendukung kelancaran tugas. Pada sisi ancaman/hambatan menghadapi perubahan peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, adanya perubahan komitmen pihak-pihak penentu kebijakan serta adanya pengaruh kebijakan daerah sekitar. Setelah faktor-faktor internal dan eksternal dimaksud dianalisa dapat diketahui bahwa pencapaian Visi dan Misi dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman/hambatan yang ada.

1. Peningkatan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, Dan Gangguan (ATHG)

Formulasi rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti terhadap stabilitas politik dan keamanan di daerah dan nasional.

Yaitu melaksanakan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik berupa Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah

2. Terorisme dan radikalisme;

Formulasi rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti terhadap banyaknya warga negara indonesia yang teridentifikasi bergabung dengan kelompok terorisme seperti ISIS.

Yaitu dengan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan berupa Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

3. Perubahan perilaku sosial

Formulasi rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti terhadap masyarakat sebagai dampak teknologi dan informasi. Yaitu dengan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial, dan Budaya berupa Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

4. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Formulasi rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti terhadap negara Indonesia sekarang bukan lagi merupakan negara transit narkoba tetapi merupakan negara pemakai. Yaitu dengan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial, dan Budaya berupa Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

5. Melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan;

Formulasi rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti terhadap seiring pengaruh globalisasi dan kebebasan dalam ruang demokrasi, orang semakin luntur dengan nilai-nilai Pancasila. Yaitu dengan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan berupa Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

6. Nilai-nilai demokrasi di Indonesia

Formulasi rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti terhadap nilai demokrasi di Indonesia, khususnya menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Yaitu dengan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik berupa Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah.

7. Melemahnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Formulasi rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti terhadap perilaku sosial masyarakat yang sangat konsumtif dan mengikuti hegemoni globalisasi, membawa dampak pada kehidupan yang pragmatis yaitu dengan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial, dan Budaya Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Berdasarkan kinerja tersebut, beberapa upaya meminimalisir kegagalan serta mengatasi kendala atau penyebab kegagalan sebagai langkah peningkatan realisasi kinerja tahun mendatang, maka langkah-langkah yang diambil, antara lain:

- a. Lebih mengintensifkan adanya forum–forum/silaturahmi/pembinaan kepada tokoh agama, masyarakat, pemuda, organisasi masyarakat, partai politik serta para generasi pemuda di Wilayah Kota Pontianak.
- b. Meningkatkan koordinasi / kerjasama di 4 pilar di tingkat Kota, Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil Dan Tokoh Agama), Kelurahan (Lurah, Babinkatibmas, Babinsa Dan Tokoh Agama) dalam mewujudkan Stabilitas Keamanan Wilayah Kota Pontianak;
- c. Membentuk FKDM Kota Pontianak di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta meningkatkan sosialisasi deteksi dini terhadap stabilitas kemananan kepada masyarakat serta elemennya untuk menimbulkan kesadaran tentang PAM SWAKARSA;
- d. Pemantauan situasi wilayah Kota Pontianak dalam cipta kondisi aman dengan mengadakan patrol gabungan dengan instansi terkait.
- e. Pengawasan terhadap Faham Radikal dan Peredaran Narkoba /P4GN di wilayah Kota Pontianak.
- f. Mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan elemen masyarakat , Ormas, Lsm, Parpol , Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Instansi terkait TNI/POLRI terhadap penyakit masyarakat di wilayah Kota Pontianak.
- g. Peningkatan SDM terkait Deteksi Dini terdapat Pencegahan, Penanganan Keamanan Dan Toleransi di Wilayah Kota Pontianak.
- h. Mengadakan Pengamanan bersama TNI/POLRI dalam Deteksi Dini timbulnya konflik di masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2025

Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam penyusunan rancangan rencana kerja PD Tahun 2025 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi. Dokumen rencana kinerja mencakup juga informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak. Proses penganggaran dan Musrenbang yang dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat diterima dan akan digunakan secara efektif untuk melaksanakan kegiatan dalam 1 tahun anggaran untuk mencapai target secara optimal. Alasan proses RKPD dan Hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari penggelembungan anggaran serta optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan, serta mengevaluasi kelogisan anggaran dengan indikator kinerja.

Tabel II.5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD (sesuai renstra untuk tahun 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (sesuai dengan asistensi ranwal renja)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Pontianak	Persentase peningkatan pemahaman politik	90%	3.434.089.000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Pontianak	Persentase peningkatan pemahaman politik	90%	3.454.590.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi Politik di Daerah	1 Dokumen	3.434.089.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi Politik di Daerah	N/A	3.454.590.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Parpol Yang diverifikasi dan menerima bantuan berdasarkan perolehan suara	N/A	3.314.590.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah	Semua Kecamatan dan Semua Kelurahan	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah (Dengan Satuan : Parpol)	N/A	3.314.590.000	

No	Rancangan Awal RKPD (sesuai renstra untuk tahun 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (sesuai, dengan asistensi ranwal renja)					Catatan Penling
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Peserta Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula, Perempuan dan Masyarakat Jumlah KPPS Cadangan Jumlah Fasilitasi Desk pemilu	00Org 00Org		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah	Semua Kecamatan dan Semua Kelurahan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah (Dengan Saluran : Orang)	0	120.000.000	

No	Rancangan Awai RPKD (sesuai rencana untuk tahun 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (sesuai dengan asistensi ranwal renja)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah	Kata Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	119.499.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah	Semua Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah (Dengan Saluran : Laporan)	1 Laporan	20.000.000	
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kata Pontianak	Persentase pemberdayaan ormas	85%	420.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Semua Kecamatan dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan ormas	85%	449.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD (sesuai renstra untuk tahun 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (sesuai dengan asistensi ranwal renja)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Pontianak	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 Dokumen	420.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Semua Kecamatan dan Semua Kelurahan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Dengan Saluan: Dokumen)	1 Dokumen	449.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	400.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Dearah	Semua Kecamatan dan Semua Kelurahan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Dearah (Dalam Bentuk orang)	1 Dokumen	429.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	1 Laporan	20.000.000	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Semua Kecamatan dan Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Dengan Saluan + Laporan)	1 Laporan	20.000.000	
3.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kota Pontianak	Persentase tingkat pemahaman nilai pancasila dan karakter kebangsaan	90%	819.000.000	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kota Pontianak	Persentase tingkat pemahaman nilai pancasila dan karakter kebangsaan (Dengan Saluan %)	90%	1.100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD (sesuai renstra untuk tahun 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (sesuai dengan asistensi ranwal renja)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Pontianak	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Dokumen	819.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Pontianak	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Dengan Saluan :%)	1 Dokumen	1.100.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	700 Orang	319.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	700 Orang	200.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Pontianak	Jumlah Paskibraka	32 Orang	500.000.000	Pembentukan Paskibraka	Kota Pontianak	Jumlah Paskibraka (Dengan Satuan : Orang)	186 Orang	800.000.000	
						Pembinaan Lanjutan kepada Paskibraka dan Dula Pancasila	Kota Pontianak	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan Kepada Purna Paskibraka dan Dula Pancasila (Dengan Saluan : Dokumen)	32 Orang	100.000.000	
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Kota Pontianak	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	90%	100.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Kota Pontianak	Persentase tingkat pemahaman terkait ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Dengan Saluan : %)	90%	138.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD (sesuai renstra untuk tahun 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (sesuai dengan asistensi ranwal renja)					Catalan Penling
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerJa	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerJa	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kata Pontianak	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Dokumen	100.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kata Pontianak	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Dengan Saluan : Dokumen)	1 Dokumen	138.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghaya Kepercayaan di Daerah	Kata Pontianak	Jumlah Orang yang Mengikut Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghaya Kepercayaan di Daerah	100 Orang	100.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghaya Kepercayaan di Daerah	Kata Pontianak	Jumlah Orang yang Mengikut Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghaya Kepercayaan di Daerah (Dengan Saluan : Orang)	500 Orang	138.000.000	
5.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kata Pontianak	Persentase fasilitasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100%	728.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kata Pontianak	Persentase fasilitasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial (Dengan Saluan : %)	100%	550.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Pontianak	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Dokumen	728.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kata Pontianak	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial (Dengan Saluan: Dokumen)	1 Dokumen	550.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD (sesuai renstra untuk tahun 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (sesuai dengan asistensi ranwal renja)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Mengikut Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 Orang	547.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Mengikut Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah (Dengan Saluan : Orang)	220 Orang	550.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	181.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	0	
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pontianak	Hasil Penilaian AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	72,5	2.912.828.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pontianak	Hasil Penilaian AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (Dengan Saluan : Nilai)	72,5	2.922.000.000	

No	Rancangan Awai RKPd (sesuai renstra untuk tahun 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (sesuai dengan asistensi ranwal renja)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kola Pontianak	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah oleh Inspektorat	95			Kola Pontianak	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah oleh Inspektorat (Dengan Saluran : Nilai)	95		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kata Pontianak	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kola Pontianak	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (Dengan Saluran:%)	100%	20.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kola Pontianak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kola Pontianak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Saluran : Dokumen)	8 Dokumen	10.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kola Pontianak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kola Pontianak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Saluran : Laporan)	7 Laporan	10.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kata Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.399.327.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kata Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Saluran:%)	100%	2.150.000.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kata Pontianak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang	2.099.327.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kola Pontianak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	22 Orang	1.800.000.000	

No	Rancangan Awai RKPD (sesuai renstra untuk tahun 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (sesuai dengan asisensi ranwal renja)					Catalan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikador kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikador kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianNerifikasi Keuangan SKPD	Kola Pontianak	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan PengujianNerifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	300.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan PenguJianNerifikasi Keuangan SKPD	Kola Pontianak	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Saluan Laporan)	6 Laporan	350.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kata Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	35.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kola Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah (Dengar Saluan:%)	100%	35.000.000	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kata Pontianak	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	32 Unit	35.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kola Pontianak	Jumlah Unit Peningkalan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Dengan Saluan : Unit)	32 Unit	35.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kola Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	217.501.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kola Pontianak	Persenlase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Saluan:%)	100%	282.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kola Pontianak	Jumlah Pake! Komponen trstalas Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Pake	3.001.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kola Pontianak	Jumlah Pake! Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Saluan Pake!)	1 Paket	3.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kata Pontianak	Jumlah Pake! Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kola Pontianak	Jumlah Pake! Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Saluan Paket)	1 Paket	40.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kata Pontianak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kola Pontianak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Dengar Saluan : Pake!)	1 Pake	40.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD (sesuai renstra untuk tahun 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (sesuai dengan asistensi ranwal renja)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikalor kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)	1 Paket	45.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Saluan : Dokumen)	12 Dokumen	4.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Saluan : Laporan)	7 Laporan	150.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	60.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan: %)	100%	30.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pontianak	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pontianak	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	60.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan : Unit)	1 Unit	30.000.000	

No	Rancangan Awai RKPД (sesuai renstra unluk tahun 2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (sesuai dengan asistensi ranwal renja)					Catatan Penling
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kine a	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana {Rp.000}	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kata Pontianak	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	170.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kata Pontianak	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Saluan . %)	100%	355.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	35.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kola Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Saluan : Laporan)	2 Laporan	65.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	135.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengar Saluan : Laporan)	4 Laporan	290.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kola Pontianak	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemenntah daerah	100%	21.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kola Pontianak	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunJang urusan pemerintah daerah (Dengan Saluan :%)	100%	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pontianak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Uni	6.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kola Pontianak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan : Unit)	3 Uni	35.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Uni	15.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Kata Pontianak	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara (Dengar Saluan : Unit)	3 Uni	15.000.000	
		Jumlah			8.413.917.000		Jumlah			8.613.590.000	

Tabel II.6

Sinkronisasi Prioritas Nasional, Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Prioritas Daerah Kota Pontianak.

Dasar Inputan SIPD RI

Prioritas Nasional		Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Barat		Prioritas Daerah Kota Pontianak		Perangkat Daerah	Urusan/ Sub/Bidang	Program RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026
PN4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PD1	Meningkatnya kualitas hidup sumber daya manusia yang berdayasaing	PD2	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan, berkelanjutan disertai kondisi aman dan tertib	Badan Kesbang pol Kota Pontianak	Pemerintahan Umum	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
PN4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PD1	Meningkatnya kualitas hidup sumber daya manusia yang berdayasaing	PD2	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan, berkelanjutan disertai kondisi aman dan tertib	Badan Kesbang pol Kota Pontianak	Pemerintahan Umum	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

Tabel. II.7

Penyelarasan Renja Kota dan Perangkat Daerah
 Dasar Penyelarasan untuk Renstra OPD Bakesbangpol 2024 - 2026

Tujuan Kota		Sasaran Kota		Indikator Tujuan/Sasaran Kota		Satuan	Definisi Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi Indikator Tujuan/Sasaran
	Meningkatn ya kualitas infrastruktur perkotaan, berkelanjutan disertai kondisi aman dan tertib	5	Meningkat nya toleransi dikalangan masyarakat	PD2	Meningkat nya kualitas infrastruktur perkotaan, berkelanjutan disertai kondisi aman dan tertib	Indeks	Hasil pengukuran yang dilakukan SETARA Institute	(Penilaian oleh SETARA Insitute)
Tujuan Bakesbangpol		Sasaran Bakesbangpol		Indikator Tujuan/Sasaran Bakesbangpol		Satuan	Definisi Indikator Tujuan/Sasaran	Formula/cara pengukuran
	Meningkatn ya toleransi dikalangan masyarakat	1	Terwujudn ya kondisi kondusif di kota Pontianak	1	Persenta se penyele saian konflik	Persen	Indikator untuk mengukur konflik yang terjadi di kota pontianak dan berapa banyak konflik yang dapat ditangani dan diselesaikan	% - (Jumlah konflik yang diselesaikan/ Jumlah konflik) x 100%

Tabel II. 8

Keterkaitan Kegiatan Bakesbangpol Kota Pontianak Tahun 2025
dengan Prioritas RKPD Kota Pontianak 2025

No.	Kegiatan Bakesbangpol	Prioritas RKPD
1	2	3
1.	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
2.	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah , Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3.	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
5.	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Forum Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Umum merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2025. Forum Gabungan Perangkat Daerah merupakan wadah bersama antara para pelaku (*stakeholder*) pembangunan untuk membahas kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan. Usulan Perangkat Daerah serta Usulan Stakholder yang lain dalam rangka upaya menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk tahun anggaran 2025 Bakesbangpol Kota Pontianak sebagai unsur perencanaan pembangunan daerah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat.

Yaitu dengan pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan.

Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari Perangkat Daerah Kota Pontianak yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2025 yang tertuang di dalam RPJMD 2024-2026. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dalam proses ini sebagai wahana mediasi untuk memaduserasikan usulan-usulan dari seluruh stakeholder dengan berpedoman kepada matrik RPJMD 2024-2026, tema dan prioritas pembangunan 2025 serta didasari reviu capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan amanat target kinerja pada RPJMD. Dari proses paduserasi tersebut, didapatkan daftar pendek usulan kegiatan yang merupakan prioritas usulan 2025 dengan tetap melihat batasan-batasan yang ada seperti program dan kegiatan yang ada matrik RPJMD, batasan pagu dan juga memperhatikan pemerataan bagi seluruh wilayah.

Proses pelaksanaan forum gabungan Perangkat Daerah urusan Pemerintahan Umum masih membutuhkan banyak penyempurnaan dan perbaikan di masa mendatang, dengan adanya kendala keterbatasan waktu, sumber daya, banyaknya kegiatan serta beragamnya visi stakholder maka diperlukan suatu langkah strategis yang sistematis dalam pelaksanaan setiap tahapnya. Sehingga mekanisme dan proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kota pontianak bisa lebih terarah dan berhasil guna nagi tercapainnya misi dan tujuan pembangunan kota pontianak.

Tabel II.9 (TC. 32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Pontianak

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Asmas dan Pokir	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1					
2	N	I	H	I	L
3					
4					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan alternatif dari RPJPN 2025-2045 untuk mewujudkan **“Indonesia Emas 2045 Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”**. Visi dan Abadi Negara **“Negara yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur”** Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV **“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”**. Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu:

- (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Pelaksanaannya didukung melalui 5 (lima) kegiatan prioritas Bankesbangpol Kota Pontianak sebagaimana termuat dalam Matrik tersebut yaitu:

1. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;
2. Fasilitasi Politik Dalam Negeri;
3. Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
4. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional; serta
5. Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Kota Pontianak saat ini serta memperhatikan potensi dan permasalahan Kesbangpol 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2024 - 2026 maka Badan Kesbangpol Kota Pontianak menetapkan suatu arah yang ingin dicapai kedepan melalui.

Tujuan dan sasaran dalam Renja Perangkat Daerah adalah turunan penjabaran tujuan Renstra Perangkat Daerah yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak. Perumusan tujuan menjabarkan apa yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak, dan akan membantu mempermudah penilaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak menetapkan Tujuan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pontianak sebagaimana Tabel : 3.2.1 (mengenai Tujuan, Indikator Kinerja, Satuan, Formula serta Target Kinerja Tujuan Pada Tahun ke.)

Tabel III.1
Tujuan Badan Kesbangpol Kota Pontianak

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan Formula	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke			
				2024	2025	2026	2027
1	Meningkatnya toleransi dikalangan masyarakat	Indeks Kota Toleran	Nilai % = (Jumlah Konflik yang diselesaikan / Jumlah Konflik) x 100%	4,85	4,95	5	5

Sedangkan analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan. Adapun cara yang dipergunakan dengan membandingkan indikator-indikator sasaran yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak menetapkan hasil pengukuran kinerja Sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2025 sebagaimana Tabel : III.2.2 (mengenai Sasaran, Indikator Kinerja, Satuan, Formula serta Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke.)Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pontianak

Tabel III.2
Sasaran Badan Kesbangpol Kota Pontianak

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan Formula	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke			
				2024	2025	2026	2027
1	Terwujudnya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	Persentase penyelesaian konflik Indikator untuk mengukur konflik yang terjadi di kota pontianak dan berapa banyak konflik yang dapat ditangani dan diselesaikan Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan Hak Pilih	Persen % = (Jumlah Konflik yang dapat diselesaikan / Jumlah Konflik yang terjadi) x 100% Jumlah perolehan suara x 100% Jumlah Pemilih	100%	100%	100%	100%

Tabel III.3

Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
Badan Kesbangpol Kota Pontianak

Tujuan RPD : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan, berkelanjutan, disertai kondisi aman dan tertib					
Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatnya toleransi dikalangan masyarakat	Terwujudnya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	1.	Meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1.	Merumuskan kebijakan teknis dan pemanfaatan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi poltik di daerah
		2.	Peningkatan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan bagi masyarakat	2.	Merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan melalui kegiatan seminar wawasan kebangsaan dan pelatihan bela negara
		3.	Memberdayakan dan mengawasi organisasi kemasyarakatan	3.	Merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
		4.	Membina dan mengembangkan ketahanan ekonomi dan budaya	4.	Merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
		5.	Meningkatkan kewaspadaan nasional dan meningkatkan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	5.	Merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik Koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan aparat keamanan, Forum- forum (FKUB, FKDM, FPK), instansi terkait dalam penanganan masalah strategis dan konflik , terorisme dan radikalisme di daerah
		6.	Meningkatkan rencana dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6.	Memperhitungkan waktu operasinal perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam Renja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025 ini, merupakan turunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024 - 2026 yang telah terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2024-2026. Perencanaan program dalam dokumen Rencana Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 diterapkan prinsip perencanaan *money follow program* dengan mengaju Penyelarasan Program berdasarkan Peraturan Permendagri No 90 Tahun 2019. Program pembangunan ini sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2025.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak sebagai perangkat daerah yang menunjang fungsi pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik bersinegis dengan Misi Wali Kota Pontianak yaitu pada Misi I dan 5. Dalam rangka pencapaian Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Misi Pembangunan:

Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya

Tujuan Pembangunan:

Meningkatnya toleransi dikalangan masyarakat

Sasaran pembangunan:

Terwujudnya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Dalam Rencana Kerja (RENJA-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2025 ini memuat 5 (lima) Program dan 5 kegiatan unsur pemerintahan umum berdasarkan penyelarasan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan KESBANGPOL Kota Pontianak Seluruh program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2025 ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025.

Tabel. III.4
Rencana Aksi Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Volume	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1. Rapat koordinasi FPK, 2. Seminar/ diseminasi/Dialog FPK	100.000.000,00	500 orang	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	...
2	Pembentukan Paskibraka	1. Rapat persiapan Pembentukan Panitia seleksi calon paskibraka 2. Pembentukan Tim seleksi calon paskibraka. 3. Pembukaan pendaftaran calon peserta paskibraka target 240 calon peserta SMA/SMK/MA Negeri/Swasta, 4. Seleksi Calon peserta Paskibraka sebanyak 60 orang peserta putra/putri, 5. pantuhir peserta hasil seleksi sebanyak 40 orang. 6. Diklat peserta seleksi paskibraka	800.000.000,00	186 Orang	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
3	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1. kegiatan seminar/diseminasi/FGD 100 orang peserta	100.000.000,00	1 Laporan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
4	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1. Belanja Hibah partai terpilih	3.314.590.000,00	12 Parpol	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	

5	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1. Rapat persiapan kegiatan sosialisasi Politik Masyarakat, 2. kegiatan sosialisasi politik masyarakat, 3. rapat persiapan sosialisasi pendidikan politik pemilih pemula usia 17th, 4. kegiatan sosialisasi pendidikan politik pemilih pemula usia 17th, 5. bimtek parpol.	120.000.000,00	50 Orang	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
6	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1. monitoring dan evaluasi kegiatan dan Laporan Parpol terhadap pengelolaan dana hibah	20.000.000,00	2 Laporan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
7	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1. rapat persiapan kegiatan sosialisasi Ormas, 2. kegiatan sosialisasi ormas, 3. pemberian bantuan Ormas atas usulan /disposisi walikota	400.000.000,00	25 Orang	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
8	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1. Monev Ormas yang terdaftar dikota Pontianak, 2. Evaluasi ormas yang menerima bantuan dari Pemerintah Kota Pontianak,	20.000.000,00	1 Laporan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	

9	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1. Rapat persiapan tim kegiatan sosialisasi P4GN 2. Kegiatan Sosialisasi P4GN dan pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Peredaran Narkoba dikalangan Remaja pada 6 Kecamatan, 3. Kegiatan Dialog FKUB	138.000.000,00	1 Dokumen	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
10	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1. Fasilitas Forkopimda, 2. rapat tim koordinasi FKDM, 3. Seminar/dialog terkait kewaspadaan dini	400.327.000,00	150 Orang	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Rencana Kerja (Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA)	25.000.000,00	8 Dokumen	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
12	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LPPD, LAKIP, SAKIP, SPIP)	10.000.000,00	7 Laporan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
13	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	2.086.459.000,00	22 Org bln	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
14	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	350.000.000,00	6 Dokumen	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
15	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	35.000.000,00	32 Unit	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
16	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3.000.000,00	1 Paket	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	40.000.000,00	1 Paket	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	

18	Ben: fEliaan l.of I c f	B.ahan J m'lah jeris baliaf lllqgi kan:ar YBI'l/I diSBdialmn	40.000.000.00	1 Pakel	Kata Sem1.1a Kecama1Bf'l, Sem1.1a Kel1.1rahan	
10	Ben: fEliaan Cal: almn 8engg&111da.an	Baraf'l Jl m'lah baraf'l/I! cetalmn dan dan peni,yaf'Mf.aaf'l/I!Bf'l/I! d;;,ediatan	45.000.000.00	1 Pakel	Kata Sem1.1a Kecamats11, Sem1.1a Kelurahan	
20	Ben: fEliaan Bacaan daf'l Peralura11J 8erundang-1mdangan	B.ahan J m'lah bah.an bacaan dan peraluran perwrlang-wdan.i;ia11	4.000.000.00	12DD DirulJIBf'l	Kata Sem1.1a Kecamats11, Sem1.1a Kel1.1rahan	
21	Ben: yeell@garaa11 rko"dila::i dan Koo 11:asi SKP□	Rapat J m'lah ra.pa] koctdir1a:si dan ikD.IISUI SKPO rq it;.elef'l/Ilgaralmn	150..000.000.00	11L.apctan	Kata Sem1.1a Kecama1Bf'l, Sem1.1a Kelurahan	
22	Ben: fEliaan E%a5aJBlliaJ Gediq K1111oor slau B la\8n l. .. nya	s.arr.ia dan J m'lah bsrang nul daerah	30.000.000.00	:rn	Kata Sem1.1a Kecamata11, Sem1.1a Kel1.1rahan	
23	Ben: fEliaan l'kmnikasi, Sumber Daya Air dan Lis.1	Jasa J m'lah wakful penr isan .. 58 lkDm1.11ikasi, smrfler da;a sir dan lisirik.	ll>. 000.000,00	21L.apctan	Kata Sem1.1a Kecamata11, Sem1.1a Kel1.1rahan	
24	Ben: fEliaan 8 yananlloo Kanlnr	Jasa Penyeii3a11 jasa ten9iia pendu ngm:oilSN	3 7..240.000.00	41L.apctan	Kata Sem1.1a Kecamats11, Sem1.1a Kel1.1rahan	
25	Ben: fEliaan 8emelili.araiin, Bia.ya 8emeh an. Pajak dan 8erizi7B'l' Kendaraan Dinas Operasioal a1au l..sp.a.ngan	Jasa J m'lah kE-Jldaraa.n lilas qier,rionel sts11 lapangan rq mendapalt.an pemeliharaan. ti3ya pemelh&rBan. pajak dan perijilB'l'	li.000.000.00	3 UJWt	Kata Sem1.1a Kecama1Bf'l, Sem1.1a Kel1.1rahan	
6	Ben: melihara&n dan MesnLBim:.,a	8ersla1an J m'lah peralBIB'l' !111111 me::in llainnra ya di ara	5...000.000.00	3U	Kata Sem1.1a Kacemata11, Sem1.1a Kel1.1rahan	
		iota!_.,	8c66:Ui15.®00,®®			

Tabel III.5
 Proyek Strategis Daerah Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Proyek Strategis	Anggaran	Volume	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas menuju kesejahteraan masyarakat yang madani	400.000.000,00	25 Orang / 39 Ormas	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	...
2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Peningkatan peran Ormas dalam menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa	20.000.000,00	1 Laporan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	...
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	3.314.590.000,00	12 Orang / 12 Parpol	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan dalam pemantapan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik guna pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila	120.000.000,00	50 Orang	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	

5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Politik pada masyarakat tentang Etika dan Budaya demokrasi Politik yang komprehensif dan berkesinambungan	20.000.000,00	2 Laporan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
6	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Masyarakat melalui optimalisasi peran KOMINDA, FKUB, FPBI, FKPT, FKDM, PPWK dan Tim Terpadu PKS	400.327.000,00	150 Orang	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
7	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan dan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional serta Fasilitasi dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya	138.000.000,00	500 Orang	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
8	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100.000.000,00	1 Laporan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak tahun 2025. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak pada tahun 2025. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak tahun 2024-2026.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2025 dan perkiraan maju Tahun 2026, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak pada Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

4.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak

Tabel IV. .

NO	KODE	URUSAN / BLOK / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPO	REALISASI CAPAIAN RENJA OPO TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLMIK						8.663.625.000,00							9.544.125.000,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						8.663.625.000,00							9.544.125.000,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						8.663.625.000,00							9.544.125.000,00	
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen			95 Persen	3.428.784.000,00						95 Persen	3.454.535.000,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen				35.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Perangkat Daerah	100 Persen	22.000.000,00	SADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen			8 Dokumen	25.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DAERAH BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Perangkat Daerah	8 Dokumen	11.000.000,00	SADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INOIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPO	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPDTAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INOIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INOIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					OAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kineja Perangkat Daerah	7 Laporan			7 laporan	10.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua KeVOesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua l Reformnasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatn ya Kualitas Infrastruktu Perkotaan, Berkelanjut an disertai Kondisi Aman dan Tertib	Perangkat Daerah	7 Laporan	11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasepemu nuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100Persen			100 Persen	2.614.535.000,00			Memperkua l Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meringkalik an Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatn ya Kualitas Infrastrukturu Perkotaan, Berkelanjut an disertai Kondisi Aman dan Tertib		100Persen	2.644.535.000,00	SADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan			22 Orang/bulan	2.264.535.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua l Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkalik an Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatn ya Kualitas Infrastrukturu Perkotaan, Berkelanjut an disertai Kondisi Aman dan Tertib		22 Orang/bulan	2.264.535.000,00	SADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INOIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPO	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPDTAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INOIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INOIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	OAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Ookumen			6 Dokumen	350.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua KeVOesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperku a Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi danPe nyeludupan	Meningkatk an Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatn ya Kualitas Infrastruktu r Perkotaan, Berkelanjut an disertai Kondisi Aman dan Tertib		6 Dokumen	360.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100Persen				35.000.000,00			Memperku a Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi danPe nyeludupan	Meningkal an Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatn ya Kualitas Infrastruktu r Perkotaan, Berkelanjut an disertai Kondisi Aman dan Tertib		100Persen	40.000.000,00	SADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	32Unit			32 Unit	35.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperku a Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi danPe nyeludupan	Meningkal an Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatn ya Kualitas Infrastruktu r Perkotaan, Berkelanjut an disertai Kondisi Aman dan Tertib		32 Unit	40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INOIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPO	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD/TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INOIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INOIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	OAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Oaerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%			100 Persen	282.000.000,00			Memperku a Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatn ya Kualitas Infrastruktu r Perkotaan, Berkelanjut an disertai Kondisi Aman dan Tertib		100%	298.000.000,00	BAOAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	3.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua KeV/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperku a Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatn ya Kualitas Infrastruktu r Perkotaan, Berkelanjut an disertai Kondisi Aman dan Tertib		1 Paket	3.500.000,00	BAOAN KESATUAN BANGSA DAN POUTIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Perafatan dan Perlengkap-an Kantor yang Osedidikan	1 Paket			1 Paket	40.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua KeV/Desa	DANA TRANSFER UMUM-OANA BAGI HASIL	Memperku a Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe ran1asan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatn ya Kualilas Infrastruktu r Perkotaan, Berkelanjut an disertai Kondisi Aman dan Tertib		1 Paket	45.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA CAN POUTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INOIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPO	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD/TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INOIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INOIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	OAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan logistik Kantor														
			Jumlah Pak.et Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	40.000.000,00	Kola Pontianak, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib		1 Paket	45.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	45.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib		1 Paket	50.000.000,00	SADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			12 Dokumen	4.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa	DANA TRANSFER UMUM-OANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib		12 Dokumen	4.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INOIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPO	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INOIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INOIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	OAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.06.0009	PenyelenggaraanRapat Koordinasi danKonsultasi SKPO														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan			7 Laporan	150.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta MemperkuatPencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan andisertai Kondisi Aman dan Tertib		7 Laporan	150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100Persen			100 Persen	30.000.000,00			Mempelkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Mompelkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan andisertai Kondisi Aman dan Tertib		100Persen	35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			3 Unit	30.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mempelkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Mompelkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan andisertai Kondisi Aman dan Tertib		2Unit	35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INOIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPO	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPDTAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INOIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INOIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	OAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Oaerah	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100Persen			100 Persen	382.249.000,00			Memperku a Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatn ya Kualitas Infrastruktu r Perkotaan, Berkelanjut an disertai Kondisi Aman dan Tertib		100Persen	360.000.000,00	BAOAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Ustrik yang Disechakan</i>	2 laporan			12 Laporan	65.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua KeVOesa	DANA TRANSFER UMUM-OANA BAGI HASIL	Memperku a Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatn ya Kualitas Infrastruktu r Perkotaan, Berkelanjut an disertai Kondisi Aman dan Tertib		2 laporan	70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	4 Laporan			4 Laporan	317.249.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa	DANA TRANSFER UMUM-OANA BAGI HASIL	Memperku a Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	Meningkatk an Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatn ya Kualitas Infrastruktu r Perkotaan, Berkelanjut an disertai Kondisi Aman dan Tertib		4 laporan	290.000.000,00	BAOAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INOIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPO	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPDTAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INOIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INOIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	OAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Oaerah Penunjang Urusan Pemerintahan Oaerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100Persen			100 Persen	50.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib		100Persen	55.000.000,00	BAGIAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayar-can Pajak dan Perizinannya	3 Unit			3 Unit	35.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua KeVOesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib		3 Unit	35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit			3 Unit	15.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib		3 Unit	20.000.000,00	SADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INOIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPO	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPDTAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INOIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INOIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	OAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paskibraka	320rang			32 Orang	800.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua KeV/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatk an Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia <i>yang</i> berdaya saing Meningkatn ya Kualitas Infrastruktu r Perkotaan, Berkelanjut an disertai Kondisi Aman dan Tertib		32 Orang	900.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Dula Pancasila														
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Dura Pancasila				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan Semua KeV/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Oemokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatk an Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia <i>yang</i> berdaya saing Meningkatn ya Kualitas Infrastruktu r Perkotaan, Berkelanjut an disertai Kondisi Aman dan Tertib			70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI/POUTIK DAN LEMBAGA PENDIOIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDA YA POLITIK	Persentase tingkat pemahaman politik	90 Persen			90 Persen	3.384.590.000,00						90 Persen	3.494.590.000,00	

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INOIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPO	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPDTAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INOIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INOIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					OAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	250rang			60 Orang	400.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua KeVOesa	DANA TRANSFER UMUM-OANA BAGI HASIL		Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib		25 Orang	500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Petaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 laporan			1 Laporan	20.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua KeVOesa	DANA TRANSFER UMUM-OANA BAGI HASIL		Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib		1 Laporan	25.000.000,00	BAOAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
S.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase tingkat pemahaman masyarakat terkait ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	90 Persen			90 Persen	138.000.000,00						90 Persen	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INOIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPO	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INOIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INOIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	OAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekoomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis <Jan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Kerahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100kumen			1 Dokumen	138.000.000,00			Memperkua l Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alamd an Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatn ya Kualitas Infrastruku l Perkotaan, Berkelanjut an disertai Kondisi Aman dan Tertib		100k.umen	150.000.000,00	BAOAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Nalkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumfah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sos/al, Budaya <Jan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang			500 Orang	138.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua KeVDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua l Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatk an Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatn ya Kualitas Infrastruku l Perkotaan, Berkelanjut an disertai Kondisi Aman dan Tertib		100 Orang	150.000.000,00	SADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPAOAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUAUTAS DAN FASIUTASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase fasilitasi peningkatan kewaspadaan nasional <Jan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sos/al	100 Persen			100 Persen	392.251.000,00						100 Persen	600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INOIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPO	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPDTAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INOIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INOIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	QAEARAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konllik Sosial	Jumlah Kebijakan TeJmis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100kumen			1 Dokumen	392.251.000,00				Meningkatk an Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjut an disertai Kondisi Aman dan Terib		100k.umen	600.000.000,00	BAAOAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koorinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intell'jen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pert>atasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konllik di Daerah	150 Orang			1500orang	392.251.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua KeVOesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Meningkatk an Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjut an disertai Kondisi Aman dan Tenib		150 Orang	600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		JUMLAH							8.663.625.000,00						9.544.125.000,00	

BAB V

PENUTUP

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak tahun 2024-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak tahun 2025

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak sebagai upaya mendukung visi dan misi Wali Kota Pontianak dan Wakil Wali Kota Pontianak. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kota Pontianak. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Tahun 2025 ini serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan Indeks Kota Toleransi, Indeks Solidaritas dan Indeks Demokrasi Indonesia di Kota Pontianak.

Pontianak, Agustus 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PONTIANAK**



AHMAD FASYM, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 196806151998031009